



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN HAK INKAR NOTARIS DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Oleh:

A. Nur Aidar A.Mustara¹, H.Djoko Sukisno², dan Ahmadi Miru³

INTISARI

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan terhadap pelaksanaan penggunaan hak ingkar notaris di dalam prakteknya di Pengadilan Negeri Makassar, dan batasan penggunaan hak ingkar notaris.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan menggunakan metode non random sampling, dengan pengambilan sample berdasarkan purposive sampling yaitu 3 (tiga) orang responden notaris yang pernah sebagai saksi terhadap akta yang dibuatnya dan 3 (tiga) orang notaris senior yang bisa memberikan pemahaman dan pendapat mengenai hak ingkar, serta narasumber terdiri dari 1 (satu) orang hakim pengawas, Ketua Ikatan Notaris Indonesia cabang Makassar, Kepala Urusan Pembina Oprasional Satuan Reserse

Berdasarkan hasil penelitian dapat diikemukakan bahwa notaris wajib menggunakan hak ingkarnya di persidangan, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 17 PJN jo. Pasal 40 PJN. Meskipun demikian diterima tidaknya permohonan hak ingkar notaris sangat tergantung pada pertimbangan hakim (Pasal 146 HIR dan Pasal 170 KUHAP). Hak ingkar hanya dapat dibatasi oleh adanya kepentingan yang lebih tinggi atau dikecualikan dalam peraturan-peraturan umum.

Kata Kunci : Penggunaan Hak Ingkar Notaris

1) Hertasning Utara II Blok F28/5, Persiapan Masale, Panakkukang, Makassar.
2) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
3) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar



JURIDICAL ANALYSIS ON THE USE OF DENIAL RIGHTS BY NOTARY IN THE DISTRICT COURT OF MAKASSAR

By

Andi Nur Aidar A. Mustara¹, Djoko Sukisno², dan Ahmadi Miru³

ABSTRACT

The objective of this research is to address an issue of the implementation of the use of denial rights by notary in real practice in the District Court of Makassar and the restriction for the use of denial rights.

This research is juridical and normative to be completed with a field research. It was conducted in Makassar city using a non random sampling technique. The samples were taken based on a purposive sampling and they consisted of 3 notaries as respondents who have acted as witnesses for their own acts, and 3 senior notaries who could give their understanding and opinion on the denial rights. The resource persons are 1 supervising judge, the Chairman of the Indonesian Notary Association of Makassar Branch, and the Head of *Pembina Operasional Satuan Reserse* section.

The research results show that a notary must use his denial rights in the trial based on the regulation of Article 17 of PJN, jo. Article 40 of PJN. However, whether or not it is approved depends much on the Judge's consideration (Article 146 of HIR and Article 170 of the Civil Code) The denial rights can only be restricted by higher interests, or exempted in the general regulations.

Keywords: the use of denial rights by notary.

¹ Hertasning Utara II Blok F28/5, Persiapan Masale, Panakkukang, Makassar

² Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta

³ Faculty of Law, Hasanuddin University, Makassar